

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realisme melihat negara sebagai *the principal actors* atau aktor utama dalam hubungan internasional dan politik global. Fokus utama dalam pembelajaran hubungan internasional adalah negara dan hubungan antarnegara.¹ Dalam hal ini realis menyatakan bahwa aktor non negara, seperti *multinational corporation* dan organisasi internasional lainnya tidaklah lebih penting dari negara. Organisasi internasional (OI) tidak berdiri secara independen karena OI terdiri dari kumpulan negara-negara berdaulat, mandiri, dan otonom yang menentukan hal-hal yang akan dilakukan oleh organisasi internasional.² Oleh karena itu, negara memiliki kebebasan kapan akan menyetujui dan kapan akan menolak suatu kerja sama atau pun putusan dalam organisasi internasional.

Struktural realisme melihat setiap tindakan negara didasari oleh keinginan untuk bertahan (*survive*) dalam sistem internasional yang anarki.³ Perilaku negara dan hubungan dengan negara lain didasarkan kepada kepentingan negara. Waltz menyatakan negara beroperasi dalam sistem "*self-help*" yang membuka kemungkinan untuk beraliansi dengan negara lain. Tindakan negara dalam sistem "*self-help*" harus didasari kepada kepentingan negara sendiri. Demi

¹Viotti Kauupi, *International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. United States of America: Allyn and Bacon A Viacom Company, 1998, Hal 55.

²Ibid

³John J Mearsheimer, "The False Promise of International Institutions", *International Security*, 19: 3, hal 74, <http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0021.pdf>, diakses pada 14 September 2016

mencapai hal itu maka negara biasanya akan menerapkan beberapa strategi terkait hubungannya dengan negara lain.⁴

Sejak reformasi ekonomi dan adopsi kebijakan *open door policy*⁵ serta perdagangan internasional, pada tahun 1979 perekonomian Tiongkok mulai mengalami pertumbuhan yang drastis.⁶ Pertumbuhan ekonomi ini telah mengangkat lebih dari 500 juta masyarakat Tiongkok keluar dari kemiskinan.⁷ Pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama tiga dekade terakhir hingga tahun 2010 mencapai rata-rata 10%,⁸ walau kemudian pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

Perdebatan mengenai bagaimana Tiongkok akan menggunakan kebangkitannya di masa depan dinilai sangat relevan dengan hubungan Tiongkok dan negara-negara kawasan Asia Tenggara.⁹ Hal ini mengingat kepada kedekatan geografis, pengalaman sejarah, dan peranan Tiongkok dalam perhitungan strategi beberapa negara di Asia Tenggara.¹⁰ Negara-negara Asia Tenggara di satu sisi siap menerima kepentingan-kepentingan Tiongkok di kawasan.¹¹ Namun, di sisi

⁴Mearsheimer, 11

⁵Open Door Policy merupakan suatu solusi dari Amerika untuk memaanuver semua negara demi mengamankan Tiongkok. Hal ini didasarkan sebagai cara terbaik untuk menghindari konflik dengan Tiongkok dan memastikan pasar Tiongkok terbuka untuk perdagangan dari semua negara. The Open Door Policy with China: Definition, Summary & Purpose, <http://study.com/academy/lesson/the-open-door-policy-with-china-definition-summary-purpose.html> (diakses pada 28 Juni 2016)

⁶Shang JinWei, "The Open Door Policy and China's Rapid Growth: Evidence from City Level Data", University of Chicago Press, (Januari 1995) : <https://core.ac.uk/download/files/153/6483525.pdf>, (diakses pada 28 Juni 2016)

⁷World Bank, "China's overview" , (September 2016) : <http://www.worldbank.org/en/country/china/overview>, (diakses pada 27 Maret 2015)

⁸Ibid

⁹Colberg, 2

¹⁰Colberg, 3

¹¹Aileen S.P. Baviera, "China's Relations with Southeast Asia: Political Security and Economic Interest", *Philippine APPEC Study Center Network*, <https://hilo.hawaii.edu/uhh/faculty/tamvu/documents/baviera.pdf>, hal 7 (diakses pada 5 September 2016)

lain pembangunan ekonomi dan peningkatan modernisasi militer Tiongkok meningkatkan kekhawatiran terhadap kemungkinan Tiongkok memaksakan agenda luar negeri dan kepentingannya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, hal ini ditakutkan akan mengorbankan kepentingan negara-negara kawasan yang lebih kecil dan lebih lemah.¹²

Penguatan hubungan Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara salah satunya terlihat pada kedekatan antara Tiongkok dan Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan erat dan tidak terlepas dari pengaruh yang dibawa oleh kebangkitan Tiongkok. Kamboja termasuk kepada negara dengan kapasitas ekonomi dan militer yang rendah dibandingkan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya.

Selain itu, Kamboja juga merupakan negara penerima bantuan luar negeri yang cukup besar. Pada tahun 2004 Kamboja menerima bantuan luar negeri dengan total 550 juta dolar AS dan meningkat menjadi 1,38 juta miliar dolar AS pada tahun 2012, angka bantuan luar negeri Kamboja meningkat sekitar 14% per tahun.¹³ Bantuan luar negeri terhadap Kamboja berasal dari beberapa negara diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Australia, Tiongkok, Asian Development, dan PBB. Namun, diantara semua donor, Tiongkok merupakan negara pendonor terbesar di Kamboja

¹²Denny Roy, "Southeast Asia and China : Balancing or Bandwagoning" , *Contemporary Southeast Asia, A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol.27, No.2, (Agustus 2005) : 308, <http://www.ou.edu/uschina/texts/Roy2005SEAsiaChina.pdf>, (diakses pada 20 Mei 2016)

¹³Khoun Theara, "As Foreign Aid Increases, Question About Conditions", <http://www.voacambodia.com/a/as-foreign-aid-increases-questions-about-conditions/1664821.html>, 21 May 2013, diakses pada 28 Oktober 2016

Kedekatan hubungan Kamboja dan Tiongkok juga semakin terlihat jelas ketika penolakan Kamboja pada *joint communique* ASEAN tahun 2012 dan kembali terulang pada tahun 2016. Menurut Denny Roy negara-negara di Asia Tenggara memiliki pola strategi yang berbeda. Sebagian negara terlihat menggunakan *hedging* dalam menghadapi dominasi Tiongkok dan sebagian lagi *bandwagoning* terhadap Tiongkok dikarenakan ketergantungan ekonomi.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa Kamboja cenderung untuk melakukan *bandwagoning* terhadap Tiongkok.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kebangkitan Tiongkok seperti dua mata pisau, di satu sisi terjadi penguatan hubungan dengan negara-negara lain dan disisi lain Tiongkok dinilai semakin agresif berkonfrontasi dengan beberapa negara tetangga dan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Salah satu konfrontasi yang dilakukan oleh Tiongkok adalah konfrontasi terkait konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS). Kebangkitan Tiongkok menjadikannya lebih tegas dan kuat dalam mengklaim dan melindungi integritas teritorial yang dianggap sebagai bagian dari kedaulatan Tiongkok, salah satunya dengan menyatakan Laut Tiongkok Selatan sebagai "*core interest* (kepentingan inti)" yang tak bisa ditawar dan Tiongkok akan menggunakan segala kekuatan untuk mempertahankan dan membela kepentingan di LTS.¹⁵

Laut Tiongkok Selatan adalah laut marginal yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik. Kawasan Laut Tiongkok Selatan terdiri dari empat kepulauan

¹⁴Ibid, 314

¹⁵Chyungly Lee, Vincent Wei-cheng Wang, *ASEAN and Recent Tensions in the South China Sea*, University of Richmond, 2014, hal 136, <http://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=polisci-faculty-publications>

yaitu, Paracels, Pratas, Macclesfield Bank, dan Kepulauan Spratly.¹⁶ Konflik pengklaiman kepulauan di Laut Tiongkok Selatan telah dimulai ketika Tiongkok membuat peta garis putus-putus untuk mengklaim semua kepulauan yang berada di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 1947.¹⁷ Dua dari empat pulau yang berada di Laut Tiongkok Selatan tersebut yaitu Spratly dan Paracels merupakan pulau yang terlibat dalam persengketaan wilayah dan batas maritim beberapa negara.¹⁸ Terdapat tujuh negara yang saling mengajukan klaim atas kepulauan ini yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam.

Peta 1.1 : Peta Konflik Laut Tiongkok Selatan



Sumber : Daniello Ermito, Beijing Retains South China Sea as Core Interest, Global Risks

Insight, <http://globalriskinsights.com/2016/02/beijing-retains-south-china-sea-as-core-interest/>

Dalam sengketa ini, Singapura dan Malaysia mengajukan klaim atas Pulau Pisang dan Pulau Batu Puteh yang terletak di perairan padat Malaka dan Selat

¹⁶Christopher C. Joyner, "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea : Problem, Policies, and Prospect for Diplomatic Accommodation", *International Maritime and Coastal Law Journal* (1998), hal 56

¹⁷Ibid

¹⁸Ibid

Singapura.¹⁹ Kemudian Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam mengklaim kedaulatan atas pulau Paracel. Selanjutnya Kepulauan Spratly diperebutkan oleh enam negara, di mana Tiongkok, Taiwan dan Vietnam mengklaim keseluruhan kepulauan, sedangkan Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam mengklaim kedaulatan atas sebagian dari Kepulauan Spratly. Semua negara yang terlibat sengketa telah menetapkan klaimnya dengan meletakkan patroli militer di Kepulauan Spratly kecuali Brunei Darussalam.²⁰

Perkembangan konflik yang terjadi selama ini telah melahirkan beberapa pertempuran kecil yang melibatkan negara-negara konflik. Di antaranya, di tahun 1988 terjadi tabrakan antara kapal perang Tiongkok dan kapal angkut Vietnam di Johnson Reef. Hal ini mengakibatkan Vietnam kehilangan dua kapal perang dan lebih dari tujuh puluh awak kapal meninggal. Kemudian, baku tembak antara kapal perang Tiongkok dan Filipina di dekat pulau Campones pada tahun 1996, dan konflik militer yang terjadi ketika kapal patroli Tiongkok menyerang dan memotong kabel kapal ekspolasi minyak Vietnam di Kepulauan Spratly pada tahun 2011.²¹

Konfrontasi Tiongkok dengan beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara, terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan kawasan. Melihat pada perkembangan konflik yang terjadi, maka *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi regional yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia

¹⁹Robert Beckman, "China UNCLOS, and the South China Sea", National University of Singapore, 2011, hal, 3, <https://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2009/09/AsianSIL-Beckman-China-UNCLOS-and-the-South-China-Sea-26-July-2011.pdf>, diakses pada 4 Maret 2017

²⁰Ibid

²¹Sukarsini Djelantik, eds, *Asia Pasifik Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hal 144

Tenggara mencoba dan berupaya untuk menjadi pihak penengah dalam menghadapi situasi dan konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan.²²Upaya pertama ASEAN yaitu pada Juni 1992 ketika Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) di Manila, ASEAN mengeluarkan dokumen bersama yang membahas mengenai masalah keamanan regional yang fokus menyoroti masalah di Laut Cina Selatan dan menghasilkan *ASEAN Declaration on the South China Sea*.²³

Kemudian upaya tersebut dilanjutkan dengan keberhasilan ASEAN melakukan penandatanganan *Declaration on the Conduct of Parties in The South China Sea* (DOC) dengan Tiongkok di Phnom Penh Kamboja pada tahun 2002, DOC merupakan dokumen politik dan bertujuan untuk mencegah tensi atas sengketa wilayah dan mengurangi resiko konflik militer di Laut Cina Selatan.²⁴ Sekalipun dokumen ini tidak bersifat mengikat namun dokumen ini merupakan suatu langkah awal karena melibatkan Tiongkok dalam penandatanganan DOC sebagai salah satu negara yang terlibat sengketa di luar negara anggota ASEAN.²⁵

Selanjutnya pada Juli 2012, ASEAN kembali mengadakan pertemuan tingkat menteri di Kamboja, dengan isu utama sengketa Laut Cina Selatan. Namun dalam 45 tahun sejarah pertemuan tingkat menteri, untuk pertama kalinya ASEAN gagal mencapai kesepakatan pada saat *joint communique*²⁶ mengenai

²²Widia Dwita Utami, “Upaya Association of Southeast Asian Nations dalam Meredam Konflik Atas Sengketa Spratly Island”, Universitas Indonesia, Depok, 2012, hal 7
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20395680-S54237-widia_dwita_utami.pdf

²³IbidWidia

²⁴Ibid Widia

²⁵Vivian Louis Forbes, *Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi-enclosed Sea*, Singapore University Press, 2001, hal 141

²⁶*Joint Communique* merupakan

penanganan klaim Tiongkok di wilayah sengketa laut Cina Selatan.²⁷ Agenda teratas dari pertemuan ini adalah pertanyaan bagaimana menanggapi klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan, dan dampak langsung terhadap anggota ASEAN atas klaim Tiongkok. Karena itu maka negara Anggota ASEAN yang terlibat sengketa, Vietnam dan Filipina langsung menyampaikan pesan terpadu terkait konfrontasi Laut Cina Selatan dengan Tiongkok ketika *joint communique* dimulai.

Di dalam Draft tersebut Filipina menyatakan bahwa *communique* yang akan disusun memperlihatkan bahwa para menteri ASEAN telah menyetujui pembahasan mengenai konfrontasi antara Filipina dan Tiongkok di Scarborough Shoal, dan keinginan Vietnam untuk menjelaskan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif di kawasan Laut Cina Selatan.²⁸ Setelah pesan terpadu terkait hal-hal penting yang akan dimasukkan dalam *joint communique* terkumpul maka empat anggota komite lainnya, yaitu Marty Natalegawa dari Indonesia, Anifah Aman dari Malaysia, Albert Del Rosario dari Filipina, dan Pham Bin Minh dari Vietnam, menyerahkan penyusunan draft kepada Har Nam Hong Perdana Menteri Kamboja.²⁹

Namun pada saat penyusunan draft, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Nam Hong menyatakan menolak pembahasan yang mengacu masalah Scarborough Shoal dan ZEE yang diajukan oleh Filipina dan Vietnam. Har Nam Hong menyatakan bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan bilateral dan tidak dapat dimasukkan dalam *joint communique*.³⁰

Har Nam Hong juga mengatakan bahwa ia telah meminta untuk mengeluarkan

²⁷John D Ciorciari, *China and Cambodia : Patron and Client ?*, International Policy Center, University of Michigan, 2013, hal 2

²⁸Ibid Ernest hal 2

²⁹Ibid Ernest hal 2

³⁰Ibid Ernest hal 2

joint communique tanpa memasukkan pembahasan mengenai isu Scarborough Shoal, menurut Har Nam Hong pertemuan tingkat menteri ASEAN bukan merupakan area pengadilan yang memberikan putusan atas suatu sengketa.³¹ Pada akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah ASEAN menyatakan bahwa tidak ada pernyataan bersama (*joint communique*) yang dirumuskan dalam pertemuan ini.

Penolakan Kamboja dalam penyusunan *joint communique* terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan pada bulan Juli tahun 2012, tidak menjadi kegagalan pertama dan terakhir ASEAN terkait pembahasan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Pada bulan Juli tahun 2016, dua tahun berselang setelah kegagalan pertama, ASEAN kembali mengalami jalan buntu terkait pembahasan sengketa tersebut. Pada pertemuan tingkat menteri ASEAN yang ke 49 di Vientiane, Laos, ASEAN kembali membahas sengketa Laut Tiongkok Selatan setelah pengajuan arbitrase internasional atas sengketa wilayah oleh Filipina pada Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Hag.

Beberapa minggu sebelum pertemuan Tingkat Menteri ke 49 di Vientiane, Pengadilan Tetap Arbitrase menyatakan menolak klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan karena sebagian besar klaim dinyatakan tidak valid. Terkait dengan putusan tersebut maka Filipina dan Vietnam menginginkan komunikasi yang disusun oleh Menteri Luar Negeri ASEAN yang merujuk pada penghormatan terhadap hukum internasional terkait putusan Den Hag. Namun pada saat itu, Kamboja menyatakan kembali menolak deklarasi apapun oleh

³¹BBC, *Asean Nations Fails to Reach Agreement on South China Sea*, Juli 2012, <http://www.bbc.com/news/world-asia-18825148>

ASEAN untuk mendukung Pengadilan Tetap Arbitrase (*Permanent Court of Arbitration*) dalam kaitannya dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Penolakan Kamboja untuk pembahasan sengketa Laut Tiongkok Selatan pada saat penyusunan *joint communique* menimbulkan banyak pertanyaan, tidak hanya di kalangan negara anggota namun juga para pengamat politik dan akademisi. Banyak pernyataan yang beredar mengenai sikap Kamboja setelah mencuatnya berita mengenai kegagalan pertama komunike ASEAN di Phnom Penh. Analis Thailand Thitinan Pongsudhirak berpendapat bahwa Kamboja telah menjadi negara yang awalnya "*beholding to Beijing*" ke tingkat yang hubungan yang membuat Tiongkok menjadi "*open patron state of phnom penh* ." ³²Scholar Carlyle Thayer berpendapat bahwa Kamboja "*Showing itself as China's stalking horse*." ³³ The Economist menyebut Kamboja sebagai Tiongkok "*de facto proxy in ASEAN*," ³⁴ dan terdapat pandangan lain yang menyebut Kamboja sebagai "klien" atau "satelit" Tiongkok.

Semenjak bergabung menjadi negara anggota tetap ASEAN pada 30 April 1999. ³⁵ Phnom Penh telah berperan penting untuk integrasi Kamboja ke dalam kelompok regional. ³⁶ Selama perjalanan Kamboja di ASEAN, ASEAN selalu menjadi landasan kebijakan luar negeri Kamboja. Pembuat kebijakan luar negeri

³²Thitinan Pongsudhirak, *China, US widen Asean rifts*, Bangkok Post, 27 Juli, 2012 (asserting that China had contributed more than US \$10 billion of aid to Cambodia in the past decade), diakses pada 3 April 2016

³³ Michelle Fitzpatrick, *ASEAN talks fail over Chinese territorial dispute*, Agence France Presse, 13 Juli, 2012

³⁴*Losing the Limelight*, Economist, July 17, 2012. <http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/07/cambodias-foreign-relations>, diakses pada 3 April 2016.

³⁵About ASEAN, <http://asean.org/asean/about-asean/>, diakses pada 10 Januari 2017

³⁶Asean Studies Program, "The South China Sea and ASEAN Unity: The Cambodian Perspective", <https://thcasean.org/read/articles/268/The-South-China-Sea-and-ASEAN-Unity-A-Cambodian-Perspective>, diakses pada 4 Maret 2017

Kamboja meyakini bahwa ASEAN akan menjadi platform penting yang dapat membuat Kamboja menjaga integritas teritorial dan kedaulatannya, serta mempromosikan kepentingan strategis dan perekonomian Kamboja.³⁷ Kemudian, terkait dengan isu konflik Laut Tiongkok Selatan Kamboja juga dari awal senantiasa mendukung dan optimis bahwa ASEAN mampu memberi kontribusi yang positif dalam penyelesaian konflik LTS. Namun, penolakan Kamboja terkait pembahasan LTS pada saat penyusunan *joint communique* ASEAN merupakan hal baru baik oleh Kamboja maupun untuk ASEAN. Peneliti melihat penolakan Kamboja pada *joint communique* ASEAN mengindikasikan perilaku *bandwagoning* Kamboja terhadap Tiongkok. Menurut Schweller, *bandwagoning* mengacu kepada bergabung dengan negara yang sedang *rising*, untuk melindungi diri baik dari rasa takut atau dari keserakahan.³⁸ Negara yang memilih untuk melakukan *bandwagoning* dengan negara *great power* juga memiliki kecenderungan untuk mengadopsi atau mendukung kepentingan inti dari negara *great power*.³⁹ Oleh karena itu, maka penelitian ini berfokus melihat alasan yang melatarbelakangi Kamboja *bandwagoning* terhadap Tiongkok terkait Isu Konflik Laut Tiongkok Selatan.



1.2 Rumusan Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Tiongkok meningkat pesat. Seiring dengan itu terdapat kecemasan negara-negara akan bagaimana Tiongkok memanfaatkan kebangkitannya dalam hubungan dengan negara lain di dunia

³⁷Ibid

³⁸Randall L. Schweller, "Bandwagoning for Profit, Bringing the Revisionist State Back In", *International Security*, Vol. 19 No. 1, 1994, <http://home.sogang.ac.kr/sites/jaechun/courses/Lists/b7/Attachments/17/Bandwagoning%20for%20Profits.pdf>, diakses pada 20 Mei 2017

³⁹Ibid

internasional dan khususnya negara di sekitar kawasan Asia Tenggara. Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan erat dan tidak terlepas dari pengaruh yang dibawa oleh kebangkitan Tiongkok. Konflik Namun seiring kebangkitannya Tiongkok dinilai semakin agresif dalam mengklaim kedaulatannya di Laut Tiongkok Selatan. Sengketa Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan melibatkan beberapa negara anggota ASEAN. Sebagai organisasi regional kawasan ASEAN mencoba untuk menjadi pihak penengah dalam sengketa ini. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya dan pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Namun untuk pertama kalinya dalam pertemuan Tingkat Menteri pada bulan Juli tahun 2012 di Pnom Penh Kamboja, dan terulang kembali pada bulan Juli tahun 2016, ASEAN gagal menyepakati *joint communique* terkait isu Laut Tiongkok Selatan. Kegagalan ini dikarenakan penolakan Kamboja dalam pembahasan isu LTS. Peningkatan hubungan kedua negara yaitu Tiongkok dan Kamboja, kemudian penolakan Kamboja pada *joint communique* ASEAN pada tahun 2012 dan 2016, mengindikasikan perilaku *bandwagoning* Kamboja terhadap Tiongkok. Atas dasar tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi Kamboja *bandwagoning* terhadap Tiongkok.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, pertanyaan yang hendak dijawab dari penelitian ini adalah : **Mengapa Kamboja *bandwagoning* terhadap Tiongkok dalam isu Konflik Laut Tiongkok Selatan?**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi Kamboja *bandwagoning* terhadap Tiongkok terkait isu konflik Laut Tiongkok Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis mengelompokkan manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat keilmuan bagi para penstudi ilmu hubungan internasional, khususnya peneliti sendiri.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan kepustakaan ilmu hubungan internasional, karena pada dasarnya para penstudi struktural realisme sepakat dengan tatanan sistem internasional yang anarki. Sistem ini membuat negara sebagai aktor kunci yang paling berpengaruh harus memiliki strategi agar bisa *survive* dan *struggle for power* dalam tatanan sistem.

1.6 Studi Pustaka

Sebagai referensi dalam penelitian yang diangkat, peneliti mencoba untuk menghimpun informasi dan tulisan yang relevan terkait dengan penelitian ini. Beberapa informasi dan tulisan ini terdiri dari buku, dan jurnal ilmiah, yang sekiranya dapat menjadi penunjang keabsahan penelitian ini.

Studi pustaka pertama yang peneliti gunakan berjudul, *China and Cambodia : Patron and Client?* yang ditulis oleh John D. Ciorciari.⁴⁰ Jurnal ini membahas dan mempertanyakan bagaimana hubungan sebenarnya antara Tiongkok dan Kamboja. Dalam jurnal ini dikatakan dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja telah menjadi salah satu mitra internasional dan sekutu diplomatik terdekat Tiongkok. Dukungan yang diberikan Kamboja untuk Tiongkok selama pembicaraan multilateral mengenai Laut Tiongkok Selatan menunjukkan kekuatan kemiripan kedua negara dan sekaligus menyebabkan beberapa kritikus menggambarkan Kamboja sebagai “negara klien” Tiongkok. Hal yang dibahas dalam jurnal ini adalah sejauh mana label tersebut berlaku dalam menggambarkan hubungan kedua negara. Dalam bentuk ideal, Ciorciari menuliskan suatu hubungan dikategorikan sebagai patron-klien memerlukan pertukaran yang memiliki manfaat asimetris. Biasanya hal ini ditandai dengan dukungan material dan perlindungan dari negara yang kuat dan tingkat rasa hormat dan sekaligus dukungan politik dari negara mitra yang lemah. Peneliti menjadikan jurnal ini sebagai salah satu referensi karena jurnal ini membahas mengenai hubungan dua negara. Perbedaan antara jurnal ini dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah pada studi kasus, peneliti menekankan pembahasan penelitian ini berfokus pada alasan penolakan Kamboja pada *joint communique* ASEAN terkait konflik LTS tahun 2012 dan 2016, dan jurnal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan bahan penelitian mengenai hubungan kedua negara.

⁴⁰John D. Ciorciari, “China and Cambodia : Patron and Client ?”, IPC Working Paper Series Number 121, Gerald R Ford School of Public Policy University of Michigan, 2013, <http://ipc.umich.edu/working-papers/pdfs/ipc-121-ciorciari-china-cambodia-patron-client.pdf>, diakses pada 20 Maret 2016

Studi pustaka selanjutnya yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah tulisan dari Denny Roy yang berjudul *Southeast Asia and China : Balancing or Bandwagoning*.⁴¹ Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa negara-negara di Asia Tenggara sebagai sebuah kelompok menggunakan dua strategi umum untuk melindungi diri terhadap dominasi yang dibawa oleh kebangkitan perekonomian Tiongkok yaitu dengan : *engagement* (melibatkan diri) dan *hedging*. *Hedging* termasuk kepada mempertahankan kerja sama dengan Amerika Serikat sebagai *balancing* terhadap Tiongkok. Hal yang paling jelas terlihat dalam kasus Filipina dan Singapura, dan lebih halusanya dalam kasus Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Sedangkan untuk Thailand, jurnal ini melihat bahwa Thailand memberlakukan *hedging* sederhana, dan Myanmar memilih untuk tidak memiliki alternatif kerja sama apapun dengan Tiongkok. Untuk wilayah *bandwagoning* negara-negara anggota ASEAN dalam jurnal ini, dijelaskan hanya sebatas dalam keinginan perdagangan sebagai upaya untuk menghindari keterasingan diri dikarenakan meningkatnya kekuatan Tiongkok di kawasan. Jurnal ini menyatakan bahwa Amerika Serikat masih menjadi pemain yang utama dan relevan di kawasan Asia Tenggara, dan penerimaan terhadap Tiongkok didasarkan pada kepatuhan Beijing atas janji-janji dalam kampanye politik. Jurnal ini menjadi referensi peneliti untuk menelaah mengenai pemahaman dari konsep *balancing* dan *bandwagoning*.

Studi pustaka ketiga yang peneliti jadikan acuan sebagai bahan untuk mengetahui perilaku kebijakan luar negeri negara kecil adalah tulisan dari Sandhya Nishanti Gunasekara yang berjudul *Bandwagoning, Balancing. and*

⁴¹Denny Roy, "Southeast Asia and China : Balancing or Bandwagoning" , Contemporary Southeast Asia, A Journal of International and Strategic Affairs, Vol.27, No.2, 2005, <http://www.ou.edu/uschina/texts/Roy2005SEAsiaChina.pdf>, diakses pada 20 Maret 2016

*Small States: A Case of Sri Lanka.*⁴²Dalam tulisannya, Gunasekara membahas mengenai beberapa strategi kebijakan luar negeri yang dapat diterapkan oleh negara kecil dalam mempertahankan kepentingan nasional negara. Strategi kebijakan luar negeri yang dibahas dalam jurnal ini adalah *balancing* dan *bandwagoning*, kebijakan ini diharapkan memperlihatkan bagaimana negara kecil dapat secara efektif terlibat dalam menyikapi politik dari *great power*. Dalam tulisan ini, penulis juga menjelaskan secara detail mengenai definisi dari negara kecil dan strategi *balancing* dan *bandwagoning* sebagai salah satu pilihan strategi yang dapat diterapkan oleh negara kecil dalam kebijakan luar negeri mereka. Sri Lanka merupakan negara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Tulisan ini mengeksplor dua kebijakan yang diambil oleh Sri Lanka setelah kemerdekaannya pada tahun 1948 yaitu penandatanganan perjanjian pertahanan dan perjanjian luar negeri dengan pemerintahan Inggris pada tahun 1948 dan keputusan kolektif anggota non-blok, dengan tujuan membuat *Indian Ocean Peace Zone* pada tahun 1971. Gunasekara melihat kebijakan Sri Lanka terkait penandatanganan perjanjian pertahanan dan perjanjian luar negeri sebagai bentuk strategi *bandwagoning* Sri Lanka terhadap Inggris. Selanjutnya, usulan membuat *Indian Ocean Peace Zone* merupakan bentuk *balancing* Sri Lanka untuk menghindari dominasi Inggris. Tulisan ini menyatakan bahwa pilihan Sri Lanka baik *bandwagoning* dengan negara-negara kuat atau *balancing* dengan kekuatan kecil dalam gerakan non-blok mengimbangi kerugian yang akan dihadapi Sri Lanka. Temuan keseluruhan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa kedua

⁴²Sandya Nishanti Gunasekara, "Bandwagoning, Balancing and Small States: A Case of Sri Lanka, *Asian Social Science*, Vol. 11, No. 28, 2015, <http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n28p212><http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n28p212>,

kebijakan yang diputuskan membantu Sri Lanka untuk mendapatkan keuntungan tertentu dan menjamin kepentingan nasionalnya.

Studi pustaka keempat yang dijadikan rujukan adalah tulisan dari Carlyle A. Thayer yang berjudul *China's Relations with Laos and Cambodia*⁴³. Dalam jurnal ini Thayer menyatakan bahwa Kamboja dan Laos merupakan dua negara yang kurang berkembang di Kawasan Asia Tenggara dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan lainnya. Namun Thayer melihat Tiongkok menginvestasikan modal yang cukup besar di kedua negara, karena itu dalam jurnal ini Thayer mempertanyakan tindakan Tiongkok tersebut. Thayer melihat secara mendalam bagaimana interaksi bilateral maupun multilateral antara Kamboja dan Laos dengan Tiongkok sebagai pemilik modal, bagaimana kedua negara membatasi pengaruh yang dimiliki oleh Tiongkok demi mempertahankan otonomi mereka sebagai negara dan sebaliknya tetap mempertahankan hubungan bilateral yang kuat dengan Tiongkok karena manfaat yang diberikan oleh Tiongkok cukup besar bagi perkembangan kedua negara. Selanjutnya, menurut Thayer hubungan kedua negara dengan Tiongkok juga didasari secara geopolitik dan geostrategis mereka, dalam hal ini Laos dan Kamboja merupakan dua daratan di Asia Tenggara yang berdekatan dengan Tiongkok karena itu mereka penting secara geostrategi bagi Tiongkok. Peneliti menjadikan tulisan ini sebagai salah satu studi pustaka untuk mendukung penelitian, karena data-data yang terdapat dalam tulisan ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam penelitian diangkat, dalam tulisan ini peneliti hanya berfokus kepada hubungan antara Tiongkok dan Kamboja.

⁴³Carlyle A. Thayer. "China's Relations with Laos and Cambodia," IACSP South East Asia Region, 18 Februari 2014

Untuk referensi konflik Laut Tiongkok Selatan dan ASEAN, peneliti menjadikan tulisan *Perspective on the South China Sea Diplomatic, Legal, and Security Dimension of the Dispute*. Tulisan ini merupakan jurnal yang dikeluarkan oleh Center for Strategic and International Security Studies pada 2014, dalam jurnal ini peneliti akan lebih focus dalam tiga tulisan, pertama dari Alice Ba dengan judul *Managing the South China Sea Dispute : What can ASEAN do?*.⁴⁴ Dalam tulisan ini Ba melihat bahwa konflik Laut Tiongkok Selatan merupakan konflik berkepanjangan yang menjadi masalah dan menuntut perhatian besar antara hubungan Tiongkok dengan ASEAN pada saat ini. Klaim tumpang tindih yang melibatkan banyak negara (ASEAN, Tiongkok, Taiwan) dengan dasar latar belakang yang berbeda atas beberapa kepulauan di Laut Tiongkok Selatan menambah kerumitan masalah yang terjadi atas konflik ini, tidak hanya itu peningkatan legitimasi rezim domestik sejalan dengan persimpangan antara politik berkekuatan besar dan negosiasi geopolitik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tulisan ini menekankan pada bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional dengan segala keterbatasan dan kerumitan politiknya mampu memainkan peran dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Selanjutnya peneliti fokus pada tulisan dari Patrick M Cronin dengan judul *The Rise of Tailored Coercion in the South China Sea*.⁴⁵ Cronin dalam tulisannya menyatakan pada beberapa waktu terakhir Tiongkok semakin tegas melakukan berbagai upaya guna mengklaim kepemilikan Laut Tiongkok Selatan. Terlihat dengan reklamasi Tiongkok atas *Johnson South Reef* pada bulan Maret,

⁴⁴Murray Hiebert, Phuong Nguyen, Gregory B. Poling, "Perspectives on the South China Sea Diplomatic, Legal, and Security of the Dispute", Center for Strategic and International Studies, 2014,

⁴⁵Ibid

Platform pengeboran di Kepulauan Paracel yang masih berada dalam wilayah ZEE Vietnam, hal ini dilihat sebagai *'tailored coercion'* yang dimaknai dengan tindakan untuk membuat klaim tersebut menjadi nyata. Praktek *"tailored coercion"* dinyatakan dengan rangkaian lengkap instrumen kebijakan, meliputi angkatan laut dan udara, penjaga pantai dan lembaga penegak hukum, hukum domestik dan internasional, dan diplomasi, serta perdagangan, pariwisata, energi, dan sumber daya.

Selanjutnya tulisan yang menjadi studi pustaka dalam jurnal ini adalah *The Role of Chinese Military in the South China Sea*, tulisan dari Philip C. Saunders⁴⁶, Saunders menyatakan bahwa strategi kawasan yang dilakukan oleh Tiongkok seiring dengan kebangkitannya memiliki kualitas seperti penderita skizofrenia. Di satu sisi Tiongkok berusaha untuk mendekatkan diri dan memperkuat hubungan kerjasama dengan negara-negara di sekitarnya, seperti negara kawasan Asian Tenggara dan Asia timur dalam hal ini Jepang, namun di sisi lain Tiongkok dengan agresif melakukan klaim atas wilayah-wilayah perbatasan dan memberikan ancaman tersendiri bagi negara-negara tetangga. Saunders melihat bahwa bagaimanapun Tiongkok tetap memprioritaskan dan tidak akan berkompromi dengan kepentingan dasar (wilayah).

1.7 Teori dan Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis alasan Kamboja *bandwagoning* terhadap Tiongkok terkait isu konflik Laut Tiongkok Selatan, peneliti menggunakan kerangka konseptual struktural realisme sebagai alat analisis yang relevan. Menurut teori realisme negara merupakan aktor sentral dalam politik internasional, dan setiap

⁴⁶Ibid

perilaku sekaligus tindakan negara akan mencerminkan dan diatur oleh persepsi kedaulatan, kepentingan, dan keamanan nasional. Salah satu karakteristik paling mendasar dari perspektif realis adalah konsep dan ukuran *power* bersamaan dengan kemampuan negara untuk menerjemahkan kemampuan *powernya* dalam mencapai dan mendefinisikan kepentingan dan tujuan nasional.⁴⁷ Bedanya, dalam realisme klasik kondisi sifat alamiah manusia yang memiliki kehendak untuk berkuasa menjadikan negara (yang dipimpin oleh individu) saling mendominasi untuk mengalahkan para pesaingnya.⁴⁸ Sedangkan, struktural realisme melihat bahwa kondisi alamiah manusia (*human nature*) tidak ada hubungannya dengan alasan mengapa negara ingin mendominasi *power*. Struktural Realisme melihat hal ini sepenuhnya dikarenakan struktur atau arsitektur sistem internasional yang memaksa negara untuk mengejar *power*. Dalam sistem di mana tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang berada di atas kekuatan besar, dan di mana tidak ada jaminan bahwa sebuah negara tidak akan menyerang, menjadi alasan yang kuat bagi negara untuk menjadi cukup kuat demi melindungi diri dan bertahan dalam sistem yang anarki.⁴⁹

1.7.1 *Small States*

Selama ini tidak terdapat definisi baku mengenai besar atau kecilnya sebuah negara, namun seringnya pendefinisian ini didasarkan kepada konsep yang mengacu pada *power*. Konsep *small* yang ditunjukkan dalam penelitian ini bukan kecil dalam ukuran luas wilayah suatu negara namun lebih kepada terminologi *power*. Hey menyatakan bahwa negara-negara kecil adalah negara dengan

⁴⁷John J. Mearsheimer, "Structural Realisme", Chocago Edu, 2006, hal 72, <http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/StructuralRealism.pdf>

⁴⁸Ibid , 6

⁴⁹Ibid , 6

populasi, area lahan, tingkat produksi, kekayaan, dan kemampuan militer yang kecil.⁵⁰ Sedangkan *power* absolut suatu negara dapat diukur oleh faktor-faktor seperti populasi (15 juta atau kurang), wilayah geografis dan GDP / GNP per kapita. Keohane dalam *Liliputians* menyatakan definisi paling dekat yang mengacu kepada kecilnya sebuah negara dalam terminologi kemampuan dan *power* adalah bagaimana kemampuan tersebut dapat diterapkan kepada siapa, kapan, dan atas tujuan apa. Negara dapat didefinisikan kecil berdasarkan keterbatasan kemampuannya dilihat dari yang pertama, pengaruhnya terhadap kepentingan keamanan, atau langsung mengancam kekuatan besar, dan yang kedua mampu mempertahankan diri terhadap serangan kekuatan besar (*great power*) dengan kapasitas *power* yang kurang lebih sama.⁵¹

Menurut Molis, kriteria yang paling penting menentukan posisi *power* negara adalah kekuatan komparatif dan posisi geopolitik. Dalam literatur negara-negara kecil, konsep sebelumnya berkaitan dengan hal-hal seperti kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan konsep yang terakhir yaitu mengevaluasi konteks geopolitik yang pasti dari sebuah negara. Menurut Kao negara yang memiliki kapasitas yang terbatas dalam melindungi kepentingan negara dan membangun subjektivitas geopolitik juga dianggap kecil.⁵²

Rapaport, Mutheba dan Terathil menyatakan posisi negara-negara kecil yang lemah menjadikan negara tidak mampu untuk melatih pasukan keamanan sendiri, sehingga negara akan lebih rentan terhadap intervensi asing dikarenakan

⁵⁰Jeanne A. K Hey, *Introducing Small State Foreign Policy*, Lynne Rienner Publishers, United States, 2003, hal

⁵¹Miriam Fendius Elman, "The Foreign Policies of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard", *British Journal of Political Science*, Vol.25, No.2, Cambridge University Press, 1995, Hal 171 <http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Fendius.pdf>

⁵²Sandya Nishanti Gunasekara, "Bandwagoning, Balancing and Small States: A Case of Sri Lanka", *Asian Social Science*, Vol. 11, No. 28, 2015, <http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n28p212> <http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n28p212>, hal 213

kekuatan dari luar dapat memberikan mereka keuntungan domestik demi memajukan kepentingan ekonomi dan ideologi.⁵³ Dengan kata lain, menurut Handel negara kecil memiliki kekuatan yang lemah dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam membela diri dengan usaha atau *power* mereka sendiri terhadap salah satu kekuatan besar.⁵⁴ Hal ini dikuatkan oleh Rohstein bahwa pada dasarnya negara kecil harus bergantung pada bantuan negara lain, institusi, proses dan perkembangan, karena negara kecil percaya bahwa mereka tidak dapat mengandalkan *power* mereka sendiri, dan hal ini juga harus diakui oleh negara-negara lain yang terlibat dalam politik internasional.⁵⁵

Sebagian arus utama dalam ilmu hubungan internasional mengabaikan studi terhadap negara-negara kecil atau lemah, karena itu para penstudi HI menyarankan untuk mengkaji perilaku negara kecil dengan berfokus pada efek dari sistem internasional. Hal ini dikarenakan, negara-negara kecil lebih disibukkan dengan hal-hal yang diperlukan untuk bertahan dibandingkan dengan negara *great power*, sehingga sistem internasional akan menjadi tingkat analisis paling relevan untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang mereka ambil.⁵⁶

1.7.2 Small States Foreign Policy Behavior

Pendekatan standar untuk perilaku kebijakan luar negeri negara-negara kecil terdiri dari dua asumsi penting. Asumsi pertama adalah bahwa sistem

⁵³Ibid, 212

⁵⁴Ibid, 213

⁵⁵Ibid, 213

⁵⁶Elman, 175

internasional adalah tingkat paling relevan dari analisis *small states*.⁵⁷ Asumsi ini menyatakan bahwa, perubahan kebijakan luar negeri *small states* dianggap ditimbulkan oleh fluktuasi struktur sistem internasional dan atau tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan besar.⁵⁸ Hal ini karena biasanya *small states* dihadapkan dengan ancaman eksternal yang dapat mengancam kelangsungan pertahanan nasional, dan kebijakan luar negeri akan mencerminkan perhatian terhadap kendala dari lingkungan internasional.⁵⁹ Kedua, diasumsikan bahwa negara-negara kecil lebih mungkin untuk *bandwagoning* dengan kekuatan besar yang mengancam daripada untuk menyeimbangkan diri dengan yang lain untuk menentangnya.⁶⁰

Michael Handel, berpendapat bahwa sistem internasional membuat mereka (negara-negara kecil) hanya memiliki sedikit ruang untuk memilih dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu gambaran ketiga dari Kenneth Waltz adalah tingkat paling relevan dari analisis. James Rosenau berpendapat sama bahwa lingkungan internasional bahkan lebih relevan bagi negara-negara kecil daripada bagi kekuatan-kekuatan besar.⁶¹ Namun, ia berpendapat bahwa tekanan domestik sering lebih besar daripada yang tekanan internasional dalam perhitungan pemimpin kekuatan besar. Jack Snyder juga menyatakan bahwa lingkungan eksternal lebih menjadi kendala bagi negara-negara kecil. Bo Huldt

⁵⁷Kenneth N Waltz, *Man, The State and War* (Columbia University Press, 2001); J. David Singer, "International Conflict: Three Levels of Analysis," *World Politics*, Vol. 12, No. 3. (Apr., 1960); Barry Buzan, "The Level-of-Analysis Problem," in Ken Booth and Steve Smith, eds., *International Relations Theory Today*, (Philadelphia, P.A.: University of Pennsylvania Press, 1995)

⁵⁸Elman, 175

⁵⁹Ibid

⁶⁰Ibid

⁶¹Giorgi Gvalia dkk, *Political Elites, Ideas, and Foreign Policy: Explaining and Understanding the International Behavior of Small States in the Former of Soviet Union*, Ilia States University, 2011, hal 21

menyatakan negara kecil lebih rentan dan memiliki alternatif yang lebih sedikit dari kekuatan utama.

Asumsi kedua adalah bahwa negara-negara kecil lebih mungkin untuk *bandwagoning* dengan kekuatan besar yang mengancam daripada untuk menyeimbangkan diri terhadapnya. Realis struktural biasanya berpendapat bahwa negara-negara akan lebih condong untuk *balancing* daripada *bandwagoning*, namun klaim ini berlaku umumnya untuk kekuatan besar (*great power*).⁶²

Menurut Jack Levy hipotesis mengenai perilaku *balancing*, mengacu pada kekuatan besar lebih dari untuk negara-negara lain. Dimana negara kuat akan melakukan *balancing* untuk melawan hegemoni potensial, sedangkan negara-negara lemah dalam kedekatan negara-negara kuat melakukan segala hal yang diperlukan untuk bertahan hidup (*survival*) dan akan lebih memilih untuk *bandwagoning* dengan yang kuat daripada *balancing* terhadap mereka.⁶³

Ketika ketergantungan ekonomi terhadap hegemon yang tinggi, maka akan sulit bagi *small states* untuk *balancing* karena hal tersebut mahal dan tidak mungkin untuk dilakukan. Kebijakan luar negeri memiliki hubungan dengan ketergantungan ekonomi *small states* dan hal ini juga memiliki implikasi terhadap hubungan politik dan ekonomi dalam negeri negara. Sebagai contoh, jika *small states* bergantung secara ekonomi dengan negara *great power* kemudian *small states* tersebut mengejar suatu kebijakan luar negeri yang tidak sesuai dengan preferensi kebijakan luar negeri *great power*, maka akan terjadi penurunan bahkan

⁶²Ibid hal 22

⁶³Giorgi hal 26

keruntuhan ekonomi oleh *small states*.⁶⁴ Hal ini dijelaskan pada prediksi utama dari Teori Ketergantungan Ekonomi:⁶⁵

Walt menyatakan terdapat beberapa alasan mengapa negara memilih untuk *bandwagoning* terhadap *great power* :⁶⁶

1. ***Power and weakness***: Semakin lemah sebuah negara maka akan semakin besar kemungkinan mereka untuk *bandwagoning* ketika mereka merasa terancam oleh kekuatan yang lebih besar, sedang negara kuat cenderung untuk melakukan *balancing* karena mereka mampu bertindak secara cepat dan efektif.

2. ***The availability of allies*** : Negara memilih untuk melakukan *bandwagoning* ketika mereka tidak menemukan sekutu yang sepadan dan potensial dengan tujuan yang sama dengan mereka.

3. ***The vulnerability of state*** : Negara yang memiliki permasalahan dengan demokratisasi dan ketergantungan ekonomi akan memilih untuk melakukan *bandwagoning*.

Menurut Schweller, *bandwagoning* mengacu kepada bergabung dengan negara yang sedang *rising*, untuk melindungi diri baik dari rasa takut atau dari keserakahan. Menurut Schweller efek *bandwagoning* tidak berarti sebagai sesuatu yang selalu diinginkan, hal ini tergantung pada sifat dari tatanan yang ada. Jika hal itu ditandai dengan konflik, maka perilaku *bandwagoning* dapat meningkatkan prospek perdamaian lebih tahan lama, dalam hal ini, alasan negara melakukan *bandwagoning* adalah hal yang penting. Schweller memberikan istilah "*Jackal*" *bandwagoning*, dengan negara ekspansionis yang sedang *rising* atau koalisi yang

⁶⁴Ibid, hal 27

⁶⁵Ibid

⁶⁶ Stephen M Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power", *International Security*, Vol. 9, No.4, Sprinveg, 1985, hal 18-20

berusaha untuk menggulingkan status quo, menurunkan stabilitas sistem yang ada.⁶⁷Sebaliknya “*piling-on bandwagoning*”, melakukan *bandwagoning* dengan berkoalisi bersama status quo yang telah ada akan meningkatkan stabilitas sistem.

Bentuk lain dari *bandwagoning* mungkin memiliki efek yang berbeda-beda pada stabilitas sistem. Terdapat pertanyaan apakah semua bentuk-bentuk *bandwagoning* memiliki kesamaan, intinya bagaimanapun, menurut Schweller adalah, bahwa mereka *bandwagoner* termotivasi oleh prospek yang menghasilkan keuntungan.⁶⁸Di sinilah yang menjadi letak perbedaan mendasar antara *bandwagoning* dan *balancing*. *Balancing* adalah kegiatan yang sangat mahal yang membuat sebagian besar negara enggan untuk terlibat, namun terkadang bagaimanapun mereka harus bertahan dan melindungi nilai-nilai mereka. Berbeda dengan *bandwagoning* yang jarang melibatkan biaya dan biasanya dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan. Menurut Schweller, inilah sebabnya mengapa *bandwagoning* lebih umum untuk dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan analisa penelitian dengan Kamboja sebagai *small states*, kemudian melihat strategi kebijakan luar negeri yang dapat diambil oleh *small states* dalam hubungannya dengan negara lain. *Bandwagoning* merupakan perilaku kebijakan yang diambil oleh *small state* jika berada dalam tiga kondisi yang dikemukakan oleh Walt. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Kamboja dalam kerangka konseptual *small states* dengan *bandwagoning* sebagai salah satu kebijakan yang diambil.

Hipotesis 1: Ketergantungan Ekonomi membatasi kemampuan negara untuk mengejar kebijakan luar negeri pro-kemerdekaan.

⁶⁷Ibid., 93

⁶⁸Randall, 9

Hipotesis 2: Variasi dalam tujuan kebijakan luar negeri suatu negara dan strategi adalah hasil dari variasi dalam tingkat ketergantungan ekonomi pada negara lain.

Dampak utama yang dapat diamati dari tingginya ketergantungan ekonomi :

Hipotesis 3.1: Ketika ketergantungan ekonomi yang tinggi, maka besar kemungkinan negara untuk mengadopsi pro-keberpihakan kebijakan luar negeri.

Hipotesis 3.2: Ketika ketergantungan ekonomi rendah, besar kemungkinan negara bebas dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang mampu memberikan deskripsi tekstual yang kompleks, mengenai bagaimana pengalaman manusia dapat menjadi bahan penelitian. Metode kualitatif juga merupakan metode penelitian yang efektif untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang tidak berwujud seperti isu norma dan nilai sosial, status sosial ekonomi, peran gender, etnis, agama, dan lain-lain.⁶⁹ Proses penelitian kualitatif yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur prosedur, melibatkan upaya-upaya penting, mengumpulkan data-data dari partisipan, menganalisis data yang didapat secara induktif, kemudian menafsirkan makna dari data yang telah di dapatkan.⁷⁰

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau

⁶⁹Qualitative Research Method Overview : A Data Collector's Field Guide, <http://www.ccs.neu.edu/course/is4800sp12/resources/qualmethods.pdf> diakses pada 9 Februari 2016

⁷⁰ John W. Creswell. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition. (California, SAGE Publications : 2013) 4-5

gejala atau isu terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat.⁷¹ Peneliti harus bersikap objektif dalam menganalisis dan menginterpretasikan setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber penelitian.

1.8.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada alasan yang melatarbelakangi Kamboja *bandwagoning* terhadap Tiongkok terkait Isu Konflik Laut Tiongkok Selatan. Untuk memfokuskan penelitian ini agar lebih terarah dan terstruktur peneliti menggunakan tahun sebagai batas penelitian yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Tahun 2010 dijadikan sebagai awal batasan penelitian karena tahun ini merupakan tahun di mana konflik LTS memanas ditandai dengan terjadinya baku tembak antara Tiongkok dan Vietnam, dan tahun 2016 merupakan data akhir yang dapat diambil oleh peneliti.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit Analisis merupakan objek kajian yang akan dijelaskan, dideskripsikan, dan dianalisis perilakunya oleh peneliti. Unit eksplanasi adalah unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis.⁷² Dari penjelasan tersebut maka unit analisis dari penelitian ini adalah Kamboja, dengan unit eksplanasi Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan tingkat analisis dari penelitian ini adalah negara.

⁷¹

⁷²Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, (Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3E: Yogyakarta, 1990), 108.

1.8.4 Sumber data dan Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mendapatkan data maupun informasi terkait penelitian dari beberapa sumber. Sumber data primer peneliti dalam penelitian ini teks, arsip, maupun dokumen-dokumen penting yang telah teruji keabsahannya berasal dari website-website resmi kedua negara Tiongkok dan Kamboja yang nantinya akan dikumpulkan dan dianalisis.

Selanjutnya sumber data sekunder akan diperoleh dari beberapa sumber tertulis seperti buku, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi yang telah teruji keabsahannya, untuk menemukan fakta-fakta yang diinginkan yang mendukung penelitian ini. Selain dari sumber-sumber tersebut situs-situs resmi berita nasional maupun internasional untuk melihat dan menganalisis hubungan Tiongkok dan Kamboja.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data yang telah ditemukan oleh peneliti yang membuat suatu penjelasan atau objek dapat diterima secara logis dan sistematis.⁷³ Data yang dianalisis dijabarkan dan dimasukkan ke dalam unit-unit dan disusun ke dalam pola dan dikelompokkan untuk memilih mana yang paling penting dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Proses analisa data dilakukan melalui tiga tahapan :

1. Pertama : proses reduksi data yaitu proses memilih data yang relevan dan dianggap berkaitan serta memiliki kontribusi besar dalam penelitian ini dan dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian.

⁷³ Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Technique in Qualitative Research*, (State University of Georgia: Georgia), 97.

2. Kedua : proses penyajian data yaitu mengajikan data-data yang didapatkan dalam bentuk narasi dan dianalisis serta diinterpretasikan dengan kerangka konseptual yang dipakai. Interpretasi merupakan tehknik analisis data yang menafsirkan makna dari data untuk mengungkapkan faktor-faktor yang saling berhubungan, yang membentuk suatu kejadian.
3. Ketiga, proses penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan proses penarikan kesimpulan akhir berdasarkan data dan hasil yang ditemukan.⁷⁴

Dalam menganalisis alasan yang melatarbelakangi Kamboja *bandwagoning* terhadap Tiongkok terkait konflik Laut Tiongkok Selatan, peneliti menggunakan konsep *small states* dan perilaku kebijakan luar negeri *small states*.

1.8.6 Sistematika Penulisan

Untuk menjaga tulisan ini berada dalam kerangka yang sistematis sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami, maka peneliti membagi tulisan dalam beberapa bab.

BAB I : Pendahuluan

Pengantar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual yang akan dipakai untuk menganalisa masalah dalam penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan secara keseluruhan permasalahan yang diteliti.

BAB II : Kamboja Sebagai *Small States*

⁷⁴Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), Jakarta: Gaung Persada Press, 2008, hal 254-255

Bab ini menggambarkan profil Negara Kamboja dan pembuktian Kamboja sebagai *small state*.

BAB III : Kebijakan Kamboja Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan Sejak Bergabung Dengan ASEAN

Bab ini berisikan kebijakan-kebijakan Kamboja terkait konflik Laut Tiongkok Selatan selama bergabung dengan ASEAN dari tahun 1999-2016.

BAB IV : Analisis Perilaku *Bandwagoning* Kamboja terhadap Tiongkok terkait Isu Konflik Laut Tiongkok Selatan.

Bab ini merupakan penggambaran dan analisis alasan yang melatarbelakangi Kamboja *bandwagoning* terhadap Tiongkok, dengan analisis Kamboja sebagai *small state* dan perilaku kebijakan luar negeri *small state* dalam analisis struktural realisme.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat peneliti dalam tulisan ini.

